**PERSEPSI MAHASISWA PRODI PPKn TENTANG
KEBEBASAN BERPENDAPAT**
(Studi Mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM)

Mustaring¹, Andi Aco Agus², Muh Nur Ikhsan³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar
¹mustaring@unm.ac.id, ²a.acoagus670@gmail.com,
³muhnurikhsan123@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out, (1) how is the knowledge of Civics Study Program students about freedom of expression. (2) The attitude of the students of the Civics Study Program is related to the implementation of freedom of expression. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, documentation and interviews. The data obtained from the research results were processed using qualitative analysis. The results of this study indicate that. (1) Knowledge of PPKn Study Program students about freedom of expression in this case the implementation of demonstration actions has not been maximized because some do not understand the regulations regarding the implementation of freedom of opinion and those who know it do not implement the regulations properly. (2) The attitude of the PPKn Study Program students regarding the implementation of freedom of expression in this case the implementation of demonstration actions is not in accordance with the regulations for implementing freedom of expression in public because its implementation still disturbs public order, such as road closures and tire burning.*

Keywords: Perception, Students, Freedom of Opinion

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengetahuan mahasiswa/i Prodi PPKn tentang kebebasan berpendapat. (2) Sikap mahasiswa/i Prodi PPKn terkait dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Pengetahuan mahasiswa/i Prodi PPKn tentang kebebasan berpendapat dalam hal ini pelaksanaan aksi demonstrasi belum maksimal karena ada yang tidak memahami peraturan tentang pelaksanaan kebebasan berpendapat dan yang mengetahuinya pun tidak melaksanakan pertauran tersebut dengan baik. (2) Sikap mahasiswa/i Prodi PPKn terkait dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam hal ini pelaksanaan aksi demonstrasi belum berkesesuaian dengan peraturan pelaksanaan kebebasan berpendapat dimuka umum karena pelaksanaannya masih mengganggu ketertiban umum seperti penutupan jalan dan pembakaran ban.

Kata Kunci: Presepsi, Mahasiswa, Kebebasan Berpendapat

PENDAHULUAN

Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama. Ciri-ciri rechtstaat menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral rechtstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia Pasal 1 menegaskan bahwa: "Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pada dasarnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan dihadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohani, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras. Secara sederhana hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki secara otomatis oleh setiap manusia tanpa harus dibeli atau diwarisi serta tidak memandang jenis kelamin, suku, agama maupun ras sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia meliputi: Hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kebebasan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan dan hak perlindungan.

Salah satu bentuk dari hak asasi manusia adalah hak kebebasan. Hal yang paling menarik perhatian adalah hak kebebasan berpendapat. Negara Indonesia di dalam sistem pemerintahannya yang menganut sistem demokrasi telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum maupun mimbar bebas. Dari beberapa opsi

untuk mengemukakan pendapat, demonstrasi atau unjuk rasa adalah media yang paling umum dan paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan warna dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat dihindari. Namun tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada tindakan yang mengarah pada anarkhisme. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dari para pendemo yang turun ke jalan dalam menyuarakan aksinya. Selain kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, faktor-faktor lain diantaranya adalah adanya provokator yang memprovokasi para demonstran untuk melakukan aksi anarkhis, tindakan represif aparat kepolisian untuk membubarkan demonstrasi, dan lain sebagainya. Disinilah kiranya penegakan hukum perlu dilakukan dengan hati-hati.

Meskipun menyatakan pendapat adalah hak setiap orang untuk mengemukakannya, namun bukan dalam artian tidak ada kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum telah diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara bebas, dan berhak mendapat perlindungan untuk mengemukakan pemikirannya. Namun dalam Undang-Undang ini juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mengemukakan pendapat serta pemikirannya. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum¹. Dalam pasal ini disebutkan bahwa tanggung jawab dari setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya

¹ Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 5 & 6

adalah menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menyampaikan pendapat dimuka umum utamanya demonstrasi yang seharusnya di jalankan dengan tertib, aman tetapi seringkali kita saksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat utamanya para pengguna jalan misalnya saja membakar ban bekas, menutup jalan raya dan penyanderaan mobil pengguna jalan yang sedang lewat juga acap kali dilakukan oleh mahasiswa sebagai alat yang diguna-kan untuk menyampaikan orasinya. Ditambah lagi jikalau tuntutan yang di sampaikan tidak dipenuhi seringkali terdapat bumbu-bumbu pemanis demonstrasi yaitu perusakan fasilitas umum yang berujung anarkis yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan esensi dari permasalahan yang ingin diperjuangkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian; 1) Bagaimana pengetahuan mahasiswa/i Prodi PPKn tentang kebebasan berpendapat. (2) Sikap mahasiswa Prodi PPKn terkait dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu; data primer dan data sekunder. Data primer, informasi yang diperoleh dari kerja lapangan melalui data primer, wawancara dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari informan yang berbeda melalui wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder, data dari

penelitian kepustakaan berupa data sekunder, dokume terkait penelitian, dan buku-buku tertentu. Prosedur pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang diguna-kan yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid. Triangulasi digunakan untuk melihat informasi yang diperoleh dari wawancara. Agar triangulasi data yang diguna-kan dalam penelitian ini bersifat multisumber, maka keabsahan data yang diperoleh dilokasi penelitian ini perlu diteliti kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Mahasiswa Prodi PPKn Tentang Kebebasan Berpendapat

Dalam penelitian ini jenis informan yang dibagi atas 3 yaitu, informan kunci, utama dan pendukung. Dimana informan kunci dalam hal ini sangat mengetahui UU yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, bukan hanya mengetahui UU yang mengatur akan tetapi juga memahami isi dari UU tersebut. Disamping mengetahui UU yang mengaturnya informan kunci juga mampu menganalisis isi pasal dari UU yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, selaian dari pada itu informan kunci juga sangat kaya akan pengalaman dalam melaksanakan aksi demonstrasi yang tentunya ditunjang dengan organisasi. Berbeda halnya dengan informan utama walaupun dia memiliki organisasi yang menunjang dalam menyampaikan pendapat juga memiliki pengalaman dalam melaksanakan aksi demonstrasi akan tetapi belum memahami Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Sedangkan informan pendukung sama sekali tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat ditambah pengalaman dalam melaksanakan. Sedangkan informan pendukung sama sekali tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang

kebebasan berpendapat ditambah pengalaman dalam melaksanakannya. Sedangkan informan pendukung sama sekali tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat ditambah pengalaman dalam melaksanakannya sangat kurang.

Siapa pun tak meragukan salah satu capaian transisi politik yaitu situasi kebebasan berekspresi dan berserikat untuk mengeluarkan pendapat yang jauh lebih baik dibandingkan ketika rezim orde baru berkuasa. Menandai berakhirnya rezim orde baru, paket regulasi tentang hak untuk menyampaikan pendapat itu diundangkan yaitu di UUD pasal 28 yang menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, demikian halnya juga dalam melaksanakan kebebasan berpendapat di muka umum undang-undang telah mengaturnya tentang tata cara melakukan kebebasan berpendapat yaitu pada undang-undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam konteks tersebut dapat dipahami apabila gagasan kebebasan berpendapat lebih banyak dipahami dan dihubungkan dengan kebebasan melakukan kritik atau koreksi atas kebijakan pemerintah, baik melalui lisan, tulisan atau bentuk yang lain seperti halnya seni. Dalam perspektif peneliti sebetulnya mahasiswa/i prodi PPKn telah mengetahui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu merupakan hak asasi manusia yang bersifat abadi, universal dan kodrati. Karena hak asasi merupakan hak setiap manusia maka dalam melaksanakan hak-haknya haruslah tidak bertentangan dengan Undang-undang yang didalamnya wajib menghormati hak-hak orang lain.

Persepsi yang disampaikan tentu berangkat dari kenyataan atau pengalaman yang ditemuinya sebagaimana defenisis persepsi menurut Mar'at

dalam walgito merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi dimana persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dari sepuluh (10) informan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa Prodi PPKn tentang kebebasan berpendapat cukup beragam ada yang hanya memahami bentuk-bentuk pelaksanaan kebebasan berpendapat seperti demonstrasi tetapi tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut dan ada yang telah memahami baik secara aturan maupun secara pelaksanaannya. Namun demikian yang menarik adalah dari segi pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam hal ini aksi demonstrasi dapat memberi dampak yang kurang baik yaitu dapat mengganggu ketertiban umum seperti penutupan jalan dan pembakaran ban yang dilaksanakan pada saat aksi demonstrasi sedangkan dalam undang-undang No. 09 tahun 1998 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat harus menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut beberapa mahasiswa yang memahami atau mengetahui aturan tentang kebebasan berpendapat dan pelaksanaannya sepakat dengan pelaksanaan penutupan jalan dan pembakaran ban, dan ada juga yang tidak sepakat karena telah mengganggu ketertiban umum dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam melaksanakan kebebasan berpendapat dalam hal ini aksi demonstrasi yang paling utama dilakukan yaitu pemberitahuan kepada kepolisian dalam bentuk tulisan terkait akan diadakannya aksi demonstrasi yang didalamnya memuat tempat, isu, waktu dan peserta yang mengikuti aksi sedangkan pelaksanaan aksi secara teknis itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan konsolidasi.

Membahas mengenai pelaksanaan demonstrasi tersebut harus didasari dari hasil konsolidasi atau pengakajian masalah terlebih dahulu dari lembaga kemahasiswaan yang membahas tentang bagaimana teknis pelaksanaan demonstrasi dilapangan termasuk proses penutupan jalan dan membakar ban itu merupakan varian aksi yang dibahas dan disepakati dalam konsolidasi.

Pelaksanaan aksi demonstrasi juga harus memahami kebebasan berpendapat baik dari aturan umumnya yaitu pada pasal 28 UUD maupun aturan khususnya yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum serta bentuk-bentuk kebebasan berpendapat seperti tulisan, karikatur, demonstrasi dan seni dimana aksi demonstrasi merupakan jalan terakhir untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Demonstrasi dilaksanakan berdasarkan pada hasil konsolidasi bukan pada peraturan hukum yang berlaku karena untuk demonstrasi tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan aksi demonstrasi secara teknisnya.

Terkait dengan Penutupan jalan dalam pelaksanaan demonstrasi menurut salah satu informan hal itu tidak termasuk dari ada tidaknya undang-undang yang mengatur tetapi hal itu dibolehkan oleh fungsi negara itu sendiri mengapa karena negara disini berperan aktif ketika ada dua hak berbenturan maka negara ada ditengah-tengah tersebut untuk mengatur.

Kebebasan berpendapat dapat dilakukan secara tertulis, lisan dan berbagai cara lainnya. Seperti demonstrasi yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya secara umum. Dimana pelaksanaan aksi demonstrasi juga haruslah terpinpin, terkonsolidasi, masif yang dipimpin oleh jendrap dan harus sesuai aturan yang ada seperti tidak boleh anarkis, melakukan tindakan kekerasan dan merusak fasilitas umum.

Pengetahuan dari beberapa mahasiswa/i prodi PPKn Universitas Negeri Makassar berkaitan dengan kebebasan berpendapat Baik dari segi peraturan dan pelaksanaanya belum sepenuhnya dipahami dengan baik jika di sandarkan pada undang-undang nomor 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, hal ini di dibuktikan dengan pemahaman yang mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara menutup jalan dan membakar ban merupakan hal yang boleh dilakukan meskipun pada dasarnya dapat mengganggu ketertiban umum karena tindakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan tentang ketidakadilan.

2. Sikap mahasiswa Prodi PPKn dengan melaksanakan kebebasan berpendapat

Membahas mengenai sikap tentunya ini tidak terlepas pemahaman yang ada. Dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat sikap harus sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat tersebut dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 09 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Kebebasan berpendapat yang dimaksud adalah pelaksanaan aksi demonstrasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa informan yang merupakan mahasiswa/i prodi PPKn memiliki sikap yang cukup beragam berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam hal ini yaitu aksi demonstrasi.

Semua mahasiswa/i sepakat dan setuju dengan aksi demonstrasi tetapi tidak semua setuju atau sepakat dengan pelaksanaan aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti penutupan jalan dan pembakaran ban bahkan dalam bentuk anarkis. Artinya pelaksanaan aksi merupakan bentuk penggunaan hak kebebasan atau kemerdekaan berpendapat dimuka umum yang harus digunakan ketika adanya ketidakadilan yang terjadi akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan yaitu hak orang

lain terkait dengan ketertiban umum. namun ada juga yang setuju dengan aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan dan pembakaran ban. Dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kesepakatan hasil konsolidasi yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian masyarakat, media dan terutama pemerintah agar tuntutan aksi dapat di ketahui dan segera di penuhi. Bahkan anarkis pun merupakan bentuk akhir tindakan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kemarahan dan keresahan terhadap ketidakadilan yang terjadi dan tidak diperhatikannya tuntutan yang sedang di perjuangkan.

Sikap mahasiswa/i prodi PPKn tentang kebebasan atau kemerdekaan berpendapat dalam hal ini pelaksanaan aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan dan bakar ban bahkan anarkis merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri atau dihindari meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang nomor 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mahasiswa terkait dengan peraturan tersebut dan memang merupakan bentuk kesengajaan yang telah direncanakan dalam konsolidasi sebelum melaksanakan aksi.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan mahasiswa/i prodi PPKn Universitas Negeri Makassar berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat cukup beragam ada yang hanya sebatas mengetahui pelaksanaannya tetapi tidak dengan aturannya, ada yang mengetahui secara jelas tentang aturan dan pelaksanaannya tetapi tetap setuju dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan dan pembakaran ban atau bahkan anarkis, serta adapula yang memahami baik secara aturan dan pelaksanaannya sehingga tidak setuju

dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan, pembakaran ban dan anarkis.

2. sikap mahasiswa/i prodi PPKn tentang kebebasan atau kemerdekaan berpendapat dalam hal ini pelaksanaan aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan dan bakar ban terbagi menjadi dua. Pertama, sikap setuju dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan dan pembakaran ban bahkan anarkis karena hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri atau dihindari meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang nomor 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mahasiswa/i terkait dengan peraturan tersebut dan memang merupakan bentuk kesengajaan yang telah direncanakan dalam konsolidasi sebelum melaksanakan aksi. Kedua sikap tidak setuju dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam bentuk aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara penutupan jalan dan pembakaran ban serta anarkis karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan ketentuan pelaksanaannya yang tidak mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
- El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Franz Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

- Jalaluddin Rakhmat. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: P. Remaja Rosda Karya.
- John Stuart Mill, 1996. *Perihal Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* Yogyakarta: Paradigma.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexi, M. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- M. Yunasri Ridhoh. 2020. *Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi (persepsi mahasiswa unm)*. Parepare: Sampan Institusi.
- Molcon, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadarya.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia
- Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal "Religia", Vol, 13 No, 02 Oktober 2010.
- Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekreasi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal "Jurnal Ham", Vol. 11, Nomor, 1 April 2020.
- Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekreasi dalam Ruang Publik di Era Digital*, Buletin Hukum dan Keadilan "Adalah", Volume 4 No, 3 2020.
- Tenang Haryanto, DKK., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.
- Eka Sandi Selfia, 2011. *Kebebasan Berpendapat Berdasar atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif HAM*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapat-berdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapat-di-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>
- <http://blog.unnes.ac.id/milakurniasari/2015/11/26/manajemen-aksi/>
- <http://ppkn.fis.unm.ac.id>. Sejarah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.